



BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Guna mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, maka diperlukan rumusan Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu 2021-2026. Strategi Pembangunan berdasarkan tujuan dan sasaran merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD akan dicapai.

Rumusan Strategi selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 dijelaskan bahwa arah kebijakan dalam RPJMD menjelaskan tahapan pembangunan tahunan (*milestone*) Kabupaten Mahakam Ulu periode 2021-2026.

Berdasarkan permasalahan daerah serta isu strategis yang telah dikemukakan dalam Bab IV, dikaitkan dengan target-target pembangunan yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diuraikan dalam Bab V, serta analisis potensi dan hambatan internal dan lingkungan eksternal maka dirumuskan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah.

6.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam



mewujudkan visi pembangunan daerah. Perumusan strategi dalam perencanaan pembangunan menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (value added) bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab bagaimana tahap-tahap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan batas waktu tertentu. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkret dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap untuk penyusunan dokumen RPJMD

Secara umum, strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dalam mencapai tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala dan wakil kepala daerah dapat dilihat pada tabel 6.1.



Tabel 6.1
**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Serta Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah
Kab. Mahakam Ulu 2021-2026**

VISI:

“Membangun Mahulu Untuk Semua : Sejahtera, Berkeadilan”

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	Arah Kebijakan
Misi 1. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			
Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Meningkatnya koneksi antar wilayah kecamatan	Pembangunan aksesibilitas jalan dan jembatan yang menghubungkan antar kecamatan dan kawasan cepat tumbuh	<ol style="list-style-type: none">Optimalisasi pembangunan sarana dan prasarana transportasi guna memenuhi kebutuhan transportasi pada jalan poros yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan kecamatan dan jalan antar kampungSinkronisasi kebijakan sektor transportasi, pengembangan wilayah dan pembangunan perekonomian.Perencanaan transportasi antar wilayah guna mengurangi kesenjangan aksesibilitas, secara terpadu, terintegrasi dan seuai dengan karakteristik kecamatan.
	Meningkatnya cakupan rumah tangga yang teraliri air bersih	Peningkatan sarana dan prasarana serta distribusi jaringan air baku	<ol style="list-style-type: none">Membangun PDAM Mahakam Ulu.Mengembangkan dan membangun teknologi tepat guna untuk pengolahan air bersih yang layak minum.Membangun SPAM dan instalasi air bersih di ibukota kabupaten dan sekitarnya.



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	Arah Kebijakan
			<ol style="list-style-type: none">4. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), pada kawasan peruntukan industri di Kecamatan Laham dan Kecamatan Long Hubung5. Pembangunan sistem pembuangan air limbah rumah tangga yang dikembangkan pada pusat-pusat kegiatan perdesaan
	Meningkatnya cakupan rumah tangga pengguna listrik	Peningkatan akses ketenagalistrikan berbasis energi baru terbarukan	<ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan jenis pembangkit tenaga listrik sesuai dengan potensi masing-masing wilayah2. Koordinasi dengan PLN untuk perluasan jaringan dan peningkatan kapasitas listrik
	Meningkatnya cakupan dan kualitas jaringan telekomunikasi dan internet	Meningkatkan koordinasi dan menjalin kerjasama dengan pihak provider jaringan telekomunikasi	Optimalisasi fasilitas jaringan internet setiap kampung
	Meningkatnya jumlah rumah yang memenuhi persyaratan rumah layak huni	Memberikan stimulus/bantuan rumah layak huni kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Pendataan rumah tidak layak huni2. Peningkatan akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan3. Pemberian bantuan pembangunan rumah layah huni bagi masyarakat tidak mampu
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara	Pendayagunaan sumber daya alam (SDA) sebagai pokok kemakmuran rakyat dilakukan secara terencana, bertanggungjawab dan sesuai serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup bagi	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan sarana prasarana MCK2. Peningkatan pengawasan dan pembinaan usaha yang berpotensi merusak lahan, air dan udara3. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap hal-hal yang berpotensi merusak lahan, air dan udara



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	Arah Kebijakan
		pembangunan berkelanjutan (<i>sustainable development</i>).	4. Pengendalian penebangan hutan di hulu sungai 5. Pencegahan kebakaran hutan 6. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi 7. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik 8. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai
Misi 2: Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal			
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Meningkatnya produktivitas usaha dan kesejahteraan pelaku ekonomi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Meningkatkan produktivitas usaha sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	1. Penyediaan bantuan alsinta, saprodi dan modal usaha; 2. Pembagian lahan pertanian kepada kelompok tani 3. Pengembangan kawasan pertanian; 4. Peningkatan kualitas SDM 5. Revitalisasi kelompok tani 6. Optimalisasi peran dan fungsi Petugas Penyuluh Lapangan (PPL)
			Menjalin kemitraan dengan perusahaan besar dan BUMN untuk menampung hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
	Meningkatnya peran sektor	Meningkatkan peran sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	1. Peningkatan kualitas SDM dan minat pelaku usaha;



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	Arah Kebijakan
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), ekonomi kreatif dan BUMKam	(UMKM), ekonomi kreatif dan BUMKam dalam mendukung perluasan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja bagi masyarakat		<ol style="list-style-type: none">2. Identifikasi potensi peluang usaha UMKM dan ekonomi kreatif dan BUMKam;3. Bantuan peralatan dan modal usaha;4. Fasilitasi promosi dan pemasaran produk melalui pemanfaatan IT;5. Menjalin kerjasama dengan perusahaan menengah dan besar di luar Mahakam Ulu
			<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan kualitas SDM aparatur;2. Optimalisasi peran lembaga pelayanan investasi satu atap;3. Promosi peluang dan potensi investasi daerah;4. Pengembangan infrastruktur pendukung;5. Kemudahan dalam berinvestasi;6. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan pemerintah provinsi dan pusat maupun dengan investor.
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Berkurangnya angka kemiskinan	Mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan produktivitas kelompok miskin dan rentan.	<ol style="list-style-type: none">1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat yang terkena dampak penurunan ekonomi melalui pemberian bantuan tunai langsung khususnya bagi kelompok masyarakat tidak mampu dan warga terdampak COVID-19, bantuan pendidikan dan bantuan kesehatan, serta bantuan perumahan;2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin berupa Pemberian Bantuan Stimulan (Sapronak, Saprodi, Alsintan) serta mewujudkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang maju



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	Arah Kebijakan
			<ol style="list-style-type: none">3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi warga miskin dan warga pasca COVID-19;4. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, antara lain ada program pengembangan industri kreatif, pengembangan industri agro, pembinaan dan pengembangan BUMKampung, dan pengembangan kewirausahaan;5. Pendataan dan sinkronisasi program pengentasan kemiskinan antar berbagai pihak yang berperan .
Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Memperluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat lokal dalam upaya mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan program, kegiatan dan sub kegiatan yang berdampak langsung pada upaya menciptakan lapangan kerja atau program pada karya, seperti infrastruktur dan perluasan kesempatan berusaha;2. Penyediaan lapangan usaha kerja yang banyak menyerap tenaga kerja;3. Mengurangi hambatan di pasar kerja dengan mendorong hubungan industrial yang harmonis, optimalisasi jaminan sosial tenaga kerja dan pengembangan pengawasan ketenagakerjaan serta menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif;4. Meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja lokal;5. Mendorong berkembangnya usaha dan investasi, terutama yang banyak menciptakan lapangan kerja formal bagi masyarakat lokal.
Misi 3: Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdayasaing tinggi			
Peningkatan Kualitas	Meningkatnya Harapan lama	Peningkatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah	<ol style="list-style-type: none">1. Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang belum tersedia.



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	Arah Kebijakan
Sumber Daya Manusia	sekolah dan Rata-rata lama sekolah	Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, Non Formal dan Kesetaraan	2. Pemenuhan akses pendidikan bagi siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar bagi siswa tidak mampu. 3. Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP)
		Penambahan lembaga pendidikan non formal dan Peningkatan mutu layanan pendidikan non formal kesetaraan	4. Memberikan kemudahan dalam perizinan pendirian untuk lembaga pendidikan non formal (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/PKBM)
	Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Pendidik dan tenaga kependidikan dengan meningkatnya presentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar kompetensi dan standar pelayanan minimal pendidikan serta prestasi pendidik dan tenaga kependidikan	5. Peningkatan Sumber Daya Tenaga Pendidik dan Kependidikan melalui DIKLAT, PPG, dan Pelatihan Guru 6. Merevitalisasi kelompok Kerja Guru Jenjang Pendidikan PAUD dalam rangka peningkatan mutu tenaga pendidik. 7. Pemberian beasiswa bagi guru yang belum berkualifikasi S1
		Peningkatan Kompetensi Sumber daya manusia	8. Pemberian bantuan kuangan dalam bentuk beasiswa kepada peserta didik dan mahasiswa asal kabupaten mahakam ulu



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	Arah Kebijakan
			<ul style="list-style-type: none">4. Perbaikan manajemen dalam penyediaan dan pendistribusian obat/farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman;5. Penurunan prevalensi stunting.6. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;7. Meningkatkan status akreditasi seluruh Puskesmas;8. Perbaikan sistem renumerasi bagi dokter spesialis.
Misi 4: Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel			
Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Mewujudkan birokrasi dengan pelayanan publik berkualitas	<ul style="list-style-type: none">1. Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan2. Peningkatan kualitas dan kapabilitas personil penyelenggara pelayanan publik3. Pembentukan saluran pengaduan, operasional desk pengaduan dan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat melalui pemanfaatan IT, media sosial dan media siaran dalam upaya penerapan paradigma pelayanan publik yang fokus pada pengelolaan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan (<i>customer-driven government</i>).4. Pengembangan prosedur pelayanan yang mudah, cepat dan transparan5. Pengembangan kebijakan yang mendukung Skema Tindakan Peningkatan Pelayanan (STPP)



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	Arah Kebijakan
			<ul style="list-style-type: none">6. Optimalisasi penerapan sistem evaluasi kinerja yang didukung dengan sistem insentif dan sanksi guna mendorong kinerja aparatur pemerintah yang efektif;7. Peningkatan sosialisasi terhadap standar prosedur, standar waktu dan standar biaya dalam pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten8. Peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian pembangunan dan keuangan daerah9. Peningkatan kuantitas dan kompetensi tenaga APIP
Meningkatnya kinerja tata kelola keuangan dan aset daerah	Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah		<ul style="list-style-type: none">1. Pengintegrasian sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan keuangan daerah2. Peningkatan kualitas SDM aparatur perencanaan, pendapatan, keuangan dan aset daerah3. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung4. Peningkatan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan sistem perencanaan dan keuangan daerah5. Intensifikasi pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)6. Penguatan database aset daerah7. Sosialisasi peraturan perpajakan8. Peningkatan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan sistem perencanaan dan keuangan daerah



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	Arah Kebijakan
			<ol style="list-style-type: none">9. Penyusunan pedoman teknis perencanaan dan keuangan daerah10. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah11. Optimalisasi upaya pendataan, penilaian, pencatatan dan pengelolaan aset daerah dengan pemanfaatan IT
Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	Meningkatkan kinerja pengelolaan pemerintahan Kampung yang baik		<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan Kampung2. Pembinaan aparatur pemerintah kampung dalam perencanaan, dan pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintahan Kampung3. Fasilitasi dan pembinaan administrasi pemerintahan kampung4. Penataan batas wilayah kampung5. Mendorong kerjasama antar kampung6. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat



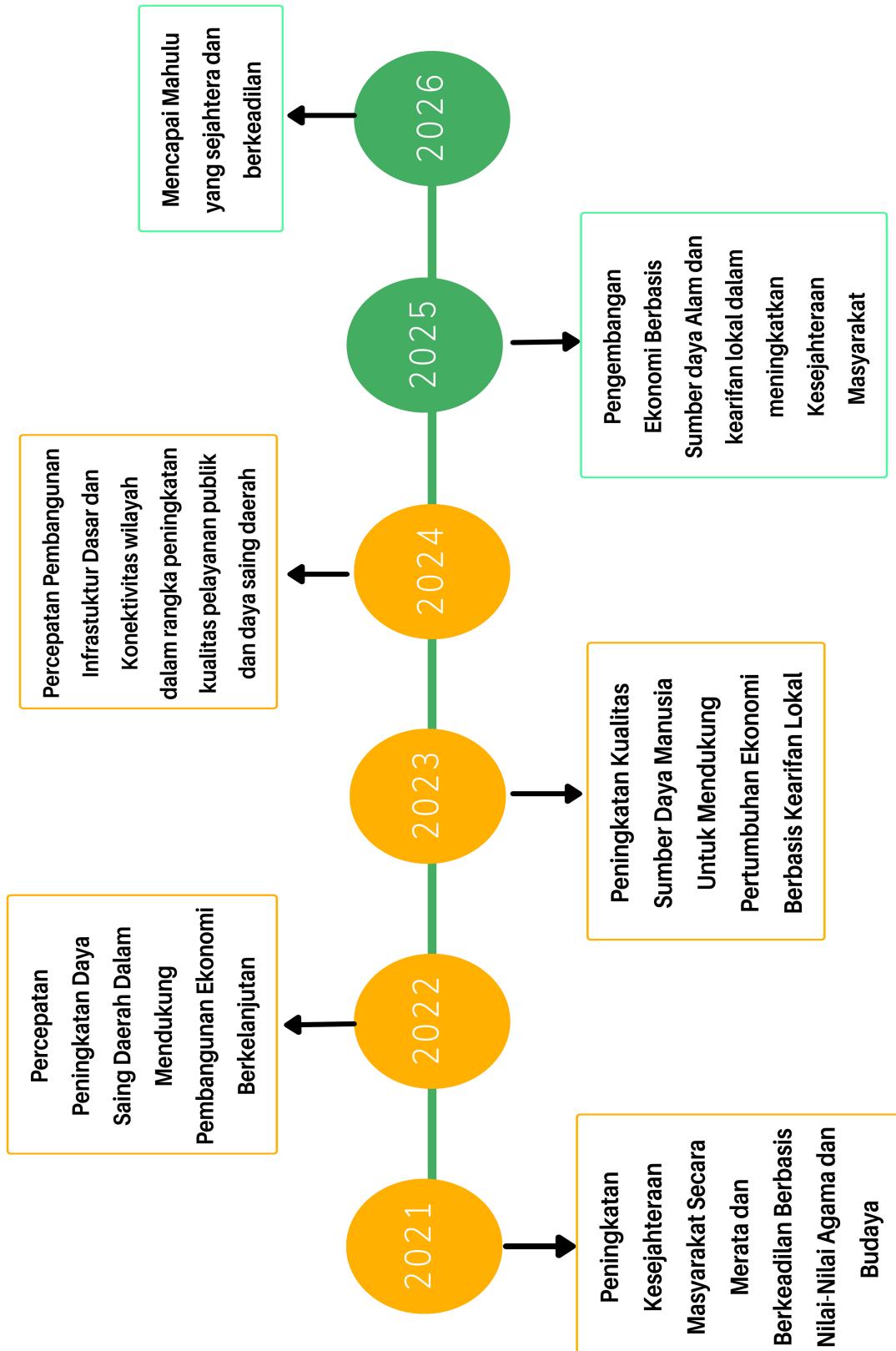
Pencapaian sasaran pembangunan (RPJMD) ditentukan oleh keberhasilan dalam melaksanakan strategi sebagai prioritas pembangunan (*strategy focused organization*) lima tahun mendatang. Dalam manajemen kinerja, prioritas pembangunan merupakan salah satu teknik dalam mengarahkan perhatian birokrasi terhadap tujuan dan sasaran utama pembangunan daerah. Dengan mempedomani tujuan, sasaran dan strategi pembangunan yang telah dirumuskan di atas, maka prioritas pembangunan daerah tahun 2019-2023, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar;
2. Peningkatan ketahanan sumberdaya air, energi dan daya dukung lingkungan hidup;
3. Peningkatan sumber daya pertanian dan perkebunan sehingga dapat mendorong meningkatnya produksi Hasil Pertanian dan Perkebunan
4. Peningkatan Usaha Ekonomi Rakyat
5. Peningkatan daya saing sumber daya manusia
6. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah

Mengacu pada strategi pembangunan di atas, serta dengan melihat 5 (lima) Sasaran Prioritas Nasional dan arah kebijakan Provinsi Kalimantan Timur, maka dapat dirumuskan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 dalam bentuk tema/tahapan pembangunan sebagaimana disajikan dalam gambar di bawah 6.1 ini:



Gambar 6.1
Tema Pembangunan Tahunan Kabupaten Mahakam Ulu
2021-2026





Selanjutnya dari tema pembangunan tahunan Kabupaten Mahakam ulu Tahun 2021-2026 tersebut dirumuskan Fokus Prioritas Pembangunan dengan memperhatikan isu strategis dan permasalahan dengan urgensi tinggi. Oleh karena itu, setiap tema RKPD memiliki fokus sebagaimana yang dijabarkan di bawah ini:

- 1. Tema RKPD Tahun 2021: "*Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan berbasis nilai-nilai agama dan budaya*", dengan fokus pembangunan berupa:**
 - a. Percepatan pemerataan pelayanan pendidikan dan Kesehatan;
 - b. Pengembangan pendidikan kejuruan dan pelatihan ketenagakerjaan;
 - c. Peningkatan produktivitas pertanian, perdagangan dan jasa;
 - d. Percepatan pemerataan pelayanan infrastruktur dasar;
 - e. Peningkatan akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan daerah,
- 2. Tema RKPD Tahun 2022: "*Percepatan Peningkatan Daya Saing Daerah Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*", dengan fokus pembangunan berupa:**
 - a. Peningkatan Produksi Pertanian melalui Melalui intensifikasi , diversifikasi produk dan manajemen pemasaran, serta peningkatan fungsi jaringan irigasi;
 - b. Pengembangan Komoditas tanaman pangan berupa padi ladang , dan komoditas tanaman perkebunan berupa kakao , karet dan kelapa sawit;
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan Pendidikan dan penyediaan lapangan pekerjaan;
 - d. Pengembangan listrik, pembangunan rumah layak huni dan penyediaan air bersih dan sanitasi layak.
- 3. Tema RKPD Tahun 2023: "*Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis kearifan lokal*", dengan fokus pembangunan berupa:**
 - a. Peningkatan kualitas dan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan
 - c. Peningkatan kualitas layanan pendidikan vokasi/kejuruan selaras kebutuhan pasarkerja
 - d. Mendorong pengembangan SMA/SMK Negeri Terpadu (Boarding School)



- e. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta kemampuan pembelajaran berbasis IT
 - f. Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat tidak mampu
 - g. Peningkatan sarpras pendidikan dalam mendukung pembelajaran jarak jauh
 - h. Pengembangan perpustakaan berbasis IT
 - i. Pemerataan pelayanan tenaga kesehatan medis maupun non medis
 - j. Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
 - k. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen lembaga kesehatan maupun fasilitasnya
 - l. Penguatan fasilitas dan pelayanan kesehatan penanganan wabah penyakit menular
 - m. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat
4. **Tema RKPD Tahun 2024: "Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konetivitas wilayah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah"**, dengan fokus pembangunan berupa:
- a. Pembangunan sistem transportasi yang terintegrasi antara transportasi darat, sungai dan udara antar daerah terpencil/perbatasan, antar wilayah kecamatan dan antar wilayah kabupaten di sekitarnya
 - b. Fasilitasi dan koordinasi pengembangan pembangkit listrik tenaga surya
 - c. Pembangunan infrastruktur pengolahan dan distribusi air bersih
 - d. Percepatan pengembangan permukiman
 - e. Pemerataan jaringan telekomunikasi sampai ketingkat kampung
 - f. Peningkatan jalan poros yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan kecamatan dan jalan antar kampung
 - g. Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana perhubungan
 - h. Peningkatan sarana prasarana MCK
 - i. Peningkatan Kualitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
 - j. Peningkatan manajemen dan penguatan kelembagaan aparatur pengelola keuangan daerah
 - k. Peningkatan kapasitas dan manajemen aparatur pemerintahan kampung
 - l. Pembinaan dan pengembangan kemandirian desa



- m. Peningkatan dukungan pelayanan publik berbasis IT
- n. Pengembangan E-gov dengan dukungan jaringan dan pengolahan data yang handal dan aman

5. Tema RKPD Tahun 2025: "*Pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat*", dengan fokus pembangunan berupa:

- a. Peningkatan produksi dan produktivitas produk pertanian di kawasan budidaya pertanian
- b. Pengintegrasian sistem agribisnis dari hulu, on-farm, hilir dan supporting system
- c. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani
- d. Peningkatan kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian
- e. Peningkatan ketersediaan, keragaman dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan
- f. Membangun pusat pariwisata berbasis budaya, kearifan lokal dan alam di setiap kampung
- g. Peningkatan iklim investasi yang kondusif
- h. Membangun kemitraan antara pengusaha besar dengan usaha masyarakat
- i. Eksplorasi potensi sumberdaya alam lokal untuk mengasilkan produk-produk unggulan yang bernilai tinggi
- j. Pengembangan produk unggulan yang bernilai tinggi
- k. Pengembangan dan peningkatan kapasitas UMKM dan Badan Usaha Milik Kampung
- l. Penyiapan pelatihan angkatan kerja pada sektor industri, perdagangan dan jasa
- m. Penguatan dan pengembangan pasar produk unggulan daerah
- n. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Keterampilan Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura
- o. Peningkatan kemitraan antara petani swadaya dengan industri hilir

6. Tema RKPD Tahun 2026: "*Mencapai Mahulu yang Sejahtera dan Berkeadilan*", dengan fokus pembangunan berupa:



- a. Pemerataan kualitas SDM di semua bidang
- b. Pemerataan Kualitas Infrastruktur Dasar
- c. Pemerataan Konektifitas telekomunikasi
- d. Memperkuat pasar-pasar dalam memasarkan hasil produk masyarakat
- e. Menjaga kelancaran distribusi kebutuhan pokok masyarakat
- f. Meningkatkan pengawasan terhadap penyalahgunaan lingkungan
- g. Mengoptimalkan pembangunan di bidang pertanian dan kesejahteraan keluarga petani
- h. Melakukan pengawasan dan pembinaan dalam upaya menciptakan keamanan pangan

6.2. PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

6.3.1. Program Prioritas I: Belanja Wajib Dan Mengikat Serta Pemenuhan Penerapan Pelayanan Dasar

Kebijakan Belanja Daerah pada RPJMD 2021-2026 diarahkan pada pemenuhan kebutuhan belanja wajib yang diatur berdasarkan peraturan Perundang-Undangan seperti:

- a) Pemenuhan kebutuhan belanja fungsi pendidikan sebesar 20 persen sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b) Pemenuhan belanja fungsi kesehatan sebesar 10 persen sebagaimana tercantum pada Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- c) Pemenuhan kewajiban belanja moda transportasi sebesar 10 persen dari target Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum pada Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
- d) Pemenuhan Belanja Pegawai atas Belanja Gaji dan Tunjangan dan rencana pemberian Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan prestasi kerja kepada seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.



6.3.2. Program Prioritas II: Belanja Pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah

Program Prioritas Pembangunan dalam RPJMD merupakan manifestasi dari Visi Politik Kepala Daerah terpilih sebagai komitmen kepada rakyat Kabupaten Mahakam Ulu. Terkait dengan hal tersebut, maka perlu diidentifikasi Program Prioritas Pembangunan Daerah sesuai dengan Janji Politik/Program aksi pada saat kampanye.

Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu periode 2021-2026, memiliki 10 janji kampanye / program aksi yang disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu. 10 janji kampanye tersebut antara lain:

- 1) Menjadikan Rumah Tangga sebagai basis Pemberdayaan Social Ekonomi Masyarakat melalui Program Ketahanan Keluarga sebesar Rp. 3 s.d 6 juta per Kepala Keluarga per Tahun;
- 2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, Pariwisata dan Aksesibilitas Wilayah:
 - a. Melanjutkan Program alokasi dana Kampung Rp. 3 s.d 6 Milyar per kampung per tahun.
 - b. Melanjutkan dan memastikan realisasi program alokasi dana RT Rp. 100 s.d 300 juta per RT pertahun.
 - c. Memperbaiki dan meningkatkan jalan kampung dan jalan antar kampung.
 - d. Menambah armada/retasi dan meningkatkan layanan (SOA) Speed Gratis bagi warga tidak mampu dan Subsidi bagi warga yang mampu.
 - e. Membangun, memperluas dan meningkatkan kualitas jaringan komunikasi publik termasuk akses internet. (telephone, WA, Youtube, SMS dll).
 - f. Membangun Jembatan Long Melaham dan Jembatan Sungai Ratah.
 - g. Membangun Jembatan Gantung Permanen Delang Kerohong - Long Pakaq Baru dengan Long Kuling & Jembatan Parallel Perbatasan.
 - h. Membangun Jembatan Gantung Permanen Long Pahangai - Datah Suling dan kampung sekitar. Membangun Jembatan Gantung Sungai Pariq Tri Pariq Makmur - Matalibaq.
 - i. Membangun Jalan Tering-Long Bagun & Long Pahangai - Tiong Ohang.
 - j. Membangun Bandara Ujoh Bilang.



- k. Mengembangkan Kawasan Batu Dinding sebagai Pusat Wisata, Budaya dan Aktifitas Warga antara lain melalui pembangunan : Sport Centre, Gedung Pemuda dan Pusat Kebudayaan.
 - l. Membangun pusat pariwisata berbasis budaya, kearifan lokal dan alam di setiap kampung.
- 3) Meningkatkan pembangunan dan peningkatan jaringan listrik, khususnya listrik mandiri yang murah, aman dan berkelanjutan.
- a. Membangun dan mengembangkan sumber daya listrik yang cukup bagi masyarakat.
 - b. Membangun jaringan listrik di setiap kampung.
 - c. Program pemasangan Sambungan Rumah (SR) Gratis.
 - d. Meningkatkan layanan listrik minimal 12 jam setiap kampung dan listrik 24 jam di ibukota kecamatan bekerja sama dengan PLN.
 - e. Membangun tower untuk memperluas jaringan listrik ibu kota ke daerah Batu Majang dan sekitarnya.
- 4) Pembangunan dan peningkatan sarana air bersih yang murah, berkualitas, dan terjamin.
- a. Memperluas akses air bersih bagi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi tepat guna untuk pengolahan air minum di setiap kampung, membangun dan mengembangkan “PAM Desa”.
 - b. Mengembangkan dan membangun teknologi tepat guna untuk pengolahan air bersih yang layak minum.
 - c. Membangun SPAM dan instalasi air bersih di ibukota kabupaten dan sekitarnya.
 - d. Membangun PDAM Mahakam Ulu.
- 5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi potensi sumberdaya daerah berbasis perdayaan masyarakat ,pembangunan berkelanjutan, berkeadilan, dan ramah lingkungan.
- a. Program pembagian lahan pertanian seluas 2 hektar per anggota kelompok tani
 - b. Melakukan pemetaan potensi masing-masing Kampung untuk pembangunan dan pengembangan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam)



- dalam rangka menciptakan produk unggulan dan pengembangan ekonomi kreatif.
- c. Program pengembangan UMKM berbasis kampung dan kawasan, dengan konsep menciptakan produk unggulan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan warga Kampung.
 - d. Membangun kerjasama dengan perusahaan dalam penyiapan dan penyerapan tenaga kerja lokal.
 - e. Peningkatan ekonomi keluarga melalui program pemberdayaan perempuan melalui kegiatan kelompok usaha kerajinan, kuliner dan lain-lain.
 - f. Meningkatkan keterampilan kaum muda melalui penyiapan Balai Latihan Kerja.
 - g. Program Bantuan Modal Usaha bagi kaum muda dan perempuan yang telah memiliki keterampilan usaha.
 - h. Menyiapkan sarana dan prasarana olah raga dan seni untuk meningkatkan potensi kaum muda/milenial di setiap kampung.
 - i. Membangun balai kerajinan seni ukir dan anyaman.
 - j. Menyiapkan tenaga pelatih/instruktur seni ukir, seni tari dan seni anyam dengan sistem kontrak (TKK/TNP).
- 6) Pemberdayaan pemerintahan dan masyarakat kampung, guna percepatan dan pemerataan pembangunan.
- a. Program pengembangan otonomi kampung melalui optimalisasi Undang-Undang Desa, khususnya untuk peningkatan partisipasi, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian pembangunan dari/oleh/untuk masyarakat kampung.
 - b. Program peningkatan insentif bagi perangkat dan Adat Kampung.
 - c. Program pembentukan/revitalisasi BUMKam (Badan Usaha Milik Kampung) sebagai lembaga keuangan mikro masyarakat kampung.
 - d. Optimalisasi peran masyarakat kampung dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan kampung.



- 7) Peningkatan kesejahteraan petani dengan mengembangkan bantuan permodalan, penerapan manajemen teknologi pertanian berbasis kerakyatan dan berwawasan lingkungan.
 - a. Membangun ketahanan pangan melalui modernisasi di pertanian lahan kering dan pembangunan persawahan untuk menuju swasembada pangan.
 - b. Peningkatan ekonomi masyarakat melalui optimalisasi perkebunan kakao.
 - c. Program dana bantuan biaya tanam padi bagi petani pada saat musim tanam.
 - d. Program revitalisasi kelompok tani dan petugas penyuluhan lapangan.
 - e. Program bantuan bibit dan pupuk organik.
 - f. Program pengawasan dan penyederhanaan distribusi pupuk bersubsidi kepada petani, poktan dan gapoktan.
 - g. Program penyediaan kredit usaha pertanian.
- 8) Penataan dan peningkatan pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan berkeadilan.
 - a. Program peningkatan sumberdaya manusia dengan menyediakan beasiswa minimal 500 paket tiap tahun untuk jenjang pendidikan S1, S2 dan S3. (dalam dan luar Negeri).
 - b. Membangun dan memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP termasuk membangun SMP unggulan di setiap kecamatan.
 - c. Membangun asrama pelajar di setiap kecamatan dan asrama mahasiswa/mahasiswi.
 - d. Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)
 - e. Program standarisasi pelayanan pendidikan di sekolah negeri
 - f. Program tambahan insentif bagi guru swasta, sekolah minggu, guru TPQ/TPA, guru ngaji, takmir masjid, pastor dan pendeta.
 - g. Program bantuan buku paket, LKS dan seragam sekolah bagi siswa-siswi sekolah negeri dan swasta.
 - h. Bantuan pakaian seragam untuk guru sekolah negeri dan swasta.
 - i. Program percepatan sertifikasi guru tanpa potongan dan pungutan.
 - j. Optimalisasi fasilitas jaringan internet di sekolah-sekolah.



- k. Memperioritaskan TKK untuk mengikuti seleksi menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan PNS.
- 9) Penataan dan peningkatan pelayanan kesehatan gratis yang berkualitas dan manusiawi.
 - a. Meningkatkan kualitas pelayanan di Rumah Sakit Pratama, Puskesmas di setiap Kecamatan dan PUSTU di setiap kampung.
 - b. Program pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah
 - c. Membangun rumah tunggu di setiap rumah sakit untuk menampung keluarga pasien.
 - d. Membangun rumah duka transit di Ibu Kota Kabupaten.
 - e. Meningkatkan kualitas layanan PUSKESMAS Terapung.
 - f. Program bantuan pakaian seragam dan peningkatan insentif tenaga medis dan non medis.
 - g. Program 1 Puskesmas minimal 2 dokter umum.
 - h. Program alokasi dana untuk revitalisasi posyandu anak, ibu, dan lansia.
 - i. Program alokasi dan bantuan untuk lansia, penyandang disabelitas, janda dan duda yang sudah tidak produktif serta penderita penyakit kronis (stroke berat, depresi akut, kebutaan, kelainan jiwa dan lain-lain).
 - j. Program peningkatan sarana dan prasarana kesehatan.
 - k. Program peningkatan kualitas tenaga medis dan nonmedis.
- 10) Penataan dan pengelolaan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional dan akuntabel.
 - a. Membangun pusat pemerintahan Kabupaten Mahulu yang terintegrasi.
 - b. Menyelenggarakan kantor pemerintahan berjalan untuk memberikan pelayanan publik dalam pengurusan KTP, KK, akta lahir, akta kematian, akta perkawinan sipil, dan perijinan dengan sistem “jemput bola”.
 - c. Program pembebasan biaya pelayanan administrasi kependudukan dasar (KTP, KK, akte kelahiran, akta perkawinan sipil, akta kematian dan surat nikah).
 - d. Mendorong terciptanya pelayanan publik yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan menetapkan standar waktu, standar biaya dan standar prosedur.



- e. Menerapkan sistem lelang jabatan untuk posisi-posisi penting di pemerintahan dalam rangka menempatkan orang yang kompeten dan kredibel pada posisi yang tepat.
- f. Program lelang jabatan Camat dan Kepala Dinas.
- g. Memberikan keteladanan kepemimpinan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
- h. Meningkatkan profesionalisme, etos kerja aparatur dan pemanfaatan teknologi informasi.
- i. Memperluas partisipasi publik dalam pembangunan, dengan melibatkan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kebijakan.
- j. Mewujudkan pelayanan publik prima dengan mengedepankan kepentingan masyarakat melalui konsep *mobile services* dan pelayanan satu pintu (*One Stop Services*).

Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan program perangkat daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih sebagaimana dituangkan dalam RPJMD. Dengan demikian Program Prioritas II meliputi Program Perangkat Daerah pendukung janji kampanye sebagaimana disajikan dalam Tabel 6.2 dan Program Perangkat Daerah yang mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih sebagaimana disajikan dalam Tabel 6.3.

Tabel 6.2
Integrasi Janji Kampanye ke dalam Program Perangkat Daerah

No	10 Program Aksi Bupati Dan Wakil Bupati	Program Terkait Dalam Kepmendagri 50-5889	Perangkat Daerah Penyelenggara
1	Menjadikan Rumah Tangga Sebagai Basis Pemberdayaan Social Ekonomi Masyarakat Melalui Program Ketahanan Keluarga Sebesar Rp. 3 S.D 6 Juta Per Kepala Keluarga Per Tahun.	Program Pemberdayaan Sosial Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



No	10 Program Aksi Bupati Dan Wakil Bupati	Program Terkait Dalam Kepmendagri 50-5889	Perangkat Daerah Penyelenggara
2	Meningkatkan Kuantitas Dan Kualitas Sarana Prasarana Publik Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan, Pariwisata Dan Aksesibilitas Wilayah.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Program Pengembangan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
3	Pembangunan Dan Peningkatan Jaringan Listrik Khususnya Listrik Mandiri Yang Murah, Aman Dan Berkelanjutan.	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian
4	Pembangunan Dan Peningkatan Sarana Air Bersih Yang Murah, Berkualitas, Dan Terjamin.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
5	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Optimalisasi Potensi Sumberdaya Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat,	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Sekretariat Daerah
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Sekretariat Daerah
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



No	10 Program Aksi Bupati Dan Wakil Bupati	Program Terkait Dalam Kepmendagri 50-5889	Perangkat Daerah Penyelenggara
5	Pembangunan Berkelanjutan, Berkeadilan, Dan Ramah Lingkungan.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		Program Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Sekretariat Daerah
		Program Pengembangan Umkm	Sekretariat Daerah
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Sekretariat Daerah
6	Pemberdayaan Pemerintahan Dan Masyarakat Kampung, Guna Percepatan Dan Pemerataan Pembangunan.	Program Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan
7	Peningkatan Kesejahteraan Petani Dengan Mengembangkan Bantuan Permodalan, Penerapan Manajemen Teknologi Pertanian Berbasis Kerakyatan Dan Berwawasan Lingkungan.	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



No	10 Program Aksi Bupati Dan Wakil Bupati	Program Terkait Dalam Kepmendagri 50-5889	Perangkat Daerah Penyelenggara
8	Penataan Dan Peningkatan Pelayanan Pendidikan Yang Bermutu, Merata Dan Berkeadilan.	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9	Penataan Dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Gratis Yang Berkualitas Dan Manusiawi.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10	Penataan Dan Pengelolaan Pemerintah Yang Bersih, Transparan, Profesional Dan Akuntabel.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan daerah
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan



Tabel 6.3
Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif
Kab. Mahakam Ulu Periode 2021-2026

Kode	Misi/Tujuan /Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/im pact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026						
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
	Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			178.622.2 19.320		211.098.58 9.161		365.573.10 0.258		325.652.81 3.526		359.726.18 8.330		389.912.28 1.234		1.830.585.1 91.829				
	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Indeks Gini	0,259	0,27	176.347.0 31.420	0,288	208.348.58 9.161	0,274	361.823.10 0.258	0,260	321.902.81 3.526	0,248	355.976.18 8.330	0,236	386.162.28 1.234	0,236	1.810.560.0 03.929			
	Meningkatnya konektivitas antar wilayah kecamatan	Percentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	27.45%	6,36%	143.331.0 82.920	13,07%	167.054.61 1.319	5%	221.368.54 0.254	5%	207.893.02 8.922	5%	216.606.61 9.122	25%	221.432.92 7.422	25%	2.123.697.2 67.620			
1 0 3	2 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Percentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	2,50%	5%	4.937.814. 000	10%		10%	5.000.000.0 00	20%	5.000.000.0 00	20%	5.000.000.0 00	20%	5.000.000.0 00	88%	24.937.814. 000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman		
1 0 3	6 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Percentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan air tidak tersumbat	tda						15%	500.000.00	15%	2.500.000.0 00	25%	2.500.000.0 00	30%	2.500.000.0 00	30%	8.000.000.0 00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	



Kode			Misi/Tujuan /Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
1	0	1	Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0%	5%	124.271.8 20.620	5,00%	153.980.69 1.320	5%	195.982.31 9.954	5%	171.850.07 8.022	5%	171.850.07 8.022	5%	171.850.07 8.022	30%	989.785.06 5.960	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2	1	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase layanan angkutan darat	0	0	8.728.448. 300	0	11.064.121. 900	0	15.164.410. 100	0	18.992.950. 900	0	26.706.541. 100	0	30.532.849. 400	5%	Dinas Perhubungan	
				Rasio Ijin Trayek	0	0		0		0		0		0		0		5%		
				Jumlah Uji Kir angkutan Umum	0	0		0		0		0		0		0		5%		
				Pemasangan Rambu-rambu	10	0		0		20		25		30		35		35		
				Jumlah Orang/Barang yang terangkut angkutan umum	0	0		0		0		0		0		0		10%		
				Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	0	0		0		0		0		0		0		10%		
				Jumlah Orang/Barang yang terangkut melalui Pelabuhan	155930r g/ 87,9 ton	19637 Org/1215 ton		20.3790rg /43.393 ton		5.393.000. 000	1520 0 Org/1 50 ton	4.721.810.2 00	1550 0 Org/1 70 ton	9.550.000.0 00	10.550.000. 000	11.550.000. 000	1600 0 Org/2 20 ton	1600 0 Org/2 20 ton	1600 0 Org/2 20 ton	1600 0 Org/2 20 ton
2	1	0	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah Arus penumpang pelayaran	773	19637		20379		2.009.798.0 99	800	820	850	870	870	870	989.785.06 5.960	989.785.06 5.960	Dinas Perhubungan	



Kode	Misi/Tujuan /asaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2021		2022		2023		2024		2025		2026							
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
Meningkatnya cakupan rumah tangga yang teraliri air bersih				Persentase Capaian Akses Air Minum Layak	24,00	28,19	1.952.130.200	31,39	7.218.168,500	34,89	12.314.340.900	38,39	25.000.000.000	42,09	25.000.000.000	45,99	25.000.000.000	45,99	96.484.639.600		
1	0	3	3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	2%	8,00%	1.952.130.200	10,00%	7.218.168,500	20,00 %	12.314.340.900	25,00 %	25.000.000.000	30,00 %	25.000.000.000	33,00 %	25.000.000.000	33,00 %	96.484.639.600	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Meningkatnya cakupan rumah tangga pengguna listrik				Presentase KK yang dialiri listrik	95,78	99,74	0	99,5	0	99,6	1.275.000.000	99,7	3.000.000.000	99,7	3.000.000.000	99,9	3.000.000.000	99,9			
1	0	4	5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	15,43%				30,43 %	1.275.000.000	35,43 %	3.000.000.000	45,43 %	3.000.000.000	55,43 %	3.000.000.000	55,43 %	10.275.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
Meningkatnya cakupan dan kualitas jaringan telekomunikasi dan internet				Cakupan Layanan Telekomunikasi	84,00%	87,00%	10.387,37 0.300	90,80%	9.821.788,342	94,00 %	18.129.262,304	96,00 %	25.359.784.604	98,00 %	50.719.569.208	99%	76.079.353.812	100%	190.497.128.570		
2	1	6	0	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan Penyelenggaraan Aplikasi Informasi lingkup Pemerintah Daerah	100%	100%	10.387,37 0.300	100%	9.821.788,342	100%	18.129.262,304	100%	25.359.784.604	100%	50.719.569.208	100%	76.079.353.812	100%	190.497.128.570	Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian
Meningkatnya jumlah rumah yang memenuhi persyaratan rumah layak huni				Rasio rumah layak huni	15,43	16,43%	20.676,44 8.000	18,43%	24.254.021.000	20,43 %	108.735,95 6.800	22,43 %	60.650.000.000	24,43 %	60.650.000.000	26,43 %	60.650.000.000	26,43 %	335.616,42 5.800		



Kode		Misi/Tujuan /asaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026						
Capaian	Rp	Capaian	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
1	03	7	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang layak	na	40%	50%	60%	70%	80%	90%	90%	292.048.451.400	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman							
1	04	2	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	15,43%	na	na	30,43 %	500.000.000	35,43 %	5.000.000.000	40,43 %	5.000.000.000	50,43 %	5.000.000.000	50,43 %	15.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman			
1	04	3	Program Kawasan Pemukiman	Persentase pemukiman yang tertata	10,00%	15,00%	5.020.960.300	20,00%	317.278.500	25,00 %	5.779.735.600	30,00 %	5.650.000.000	40,00 %	5.650.000.000	50,00 %	5.650.000.000	50,00 %	28.067.974.400	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	80,12	80,65	2.275.187.900	82,65	2.750.000,00	3.750.000,00	83,67	3.750.000,00	84,94	3.750.000,00	86,2	3.750.000,00	87,47	20.025.187.900			
Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara				Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	77,90	50	61,88	66,88	2.750.000,00	71,88	3.750.000,00	79,38	3.750.000,00	86,88	3.750.000,00	86,88	20.025.187.900				
				Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	82,78	93,98	92,56	93,56	3.750.000,00	94,56	3.750.000,00	96,06	3.750.000,00	97,56	3.750.000,00	97,56	20.025.187.900				



Kode	Misi/Tujuan /Saranan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
				2021		2022		2023		2024		2025		2026											
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)							
		Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lahan	79,00	100		100		100		100		100		100		100		100							
2	1	3	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan tingkat Pencemaran / kerusakan Lingkungan Hidup	na	na	750.000.00	na	750.000.00	66,88	750.000.00	71,88	750.000.00	79,38	750.000.00	86,88	750.000.00	86,88	4.500.000.00	Dinas Lingkungan Hidup					
2	1	5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Cakupan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang diverifikasi	50%	50%	110.187.900	60%	500.000.00	70%	500.000.00	75%	500.000.00	80%	500.000.00	85%	500.000.00	85%	2.610.187.900	Dinas Lingkungan Hidup					
2	1	1	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	20%	20%	1.415.000.000	30%	1.500.000.00	40%	2.500.000.00	50%	2.500.000.00	60%	2.500.000.00	75%	2.500.000.00	75%	12.915.000.000	Dinas Lingkungan Hidup					
			Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal		21.137.92	2.200		25.695.138.	526		57.224.700.	000		65.699.918.	250		72.021.793.	283		73.338.506.	933				
			Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi	-0,22	1,27	12.518.94	0,91	16.766.281.	126	1,71	44.668.958.	900	2,39	53.095.254.	250	3,23	58.882.763.	283	4,38	59.836.673.	633			



Kode	Misi/Tujuan /Saranan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026						
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
Meningkatnya produktivitas usaha dan kesejahteraan pelaku ekonomi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan				Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian (Dalam Arti Luas) (%)	75,18	74,71	7.201.735.800	74,53	13.767.970.500	74,23	23.941.297.400	73,93	27.978.169.900	73,63	31.614.969.800	73,33	31.675.000.000	73,33	136.179.143.400	
2 0 9	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAUALATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Ketersediaan Pangan Kabupaten	105%	106%	0	107%	0	108%	0	109%	1.000.000.000	110%	1.000.000.000	110%	1.000.000.000	110%	3.000.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
2 0 9	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Capaian Skor Pola Pangan Harapan	90,4	91,6	747.587,500	92,8	1.192.411,900	94	951.879,200	95,2	500.000.000	96,2	500.000.000	97,98	500.000.000	98,98	4.391.878,600	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
3 2 5	3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi perikanan Tangkap (Ton)	35,48 Ton	315 Ton	166.532,700	330 Ton	47.253.300	345 Ton	400.775,800	350 Ton	500.000.000	365 Ton	500.000.000	380 Ton	500.000.000	380 Ton	2.114.561,800	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
3 2 5	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi perikanan Budidaya (Ton)	11,67 Ton	135 Ton	519.941,700	150 Ton	28.838.600	165 Ton	790.472,200	180 Ton	1.000.000.000	195 Ton	1.000.000.000	110 Ton	1.000.000.000	110 Ton	4.339.252,500	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
3 2 7	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN	Produktivitas Tanaman Pangan Strategis (Padi)	1,57	1,81	2.093.193,600	2,08	8.955.057,500	2,39	9.834.000,000	2,63	13.613.200,100	2,89	17.200.000,000	3,18	17.150.000,000	3,18	68.845.451,200	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	



Kode		Misi/Tujuan /Saranan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026					
Capaian	Rp	Capaian	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
		SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	1,50%	1,60%			1,70%		1,80 %		1,90 %		2,00 %		2,10 %		2,10 %		
			Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	3,20%	3,30%			3,40%		3,50 %		3,60 %		3,70 %		3,80 %		3,80 %		
			Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	1,20%	1,30%			1,40%		1,50 %		1,60 %		1,70 %		1,80 %		1,80 %		
3	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas Lahan Tanaman Pangan yang di fasilitasi pengelolaannya (Ha)	2.633	3.000	893.489.100		3.600		4.000		4.200		4.500		4.500		23.800	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	7		Luas Lahan Tanaman Perkebunan (Ha) yang di fasilitasi pengelolaannya	2.300 Ha	500 Ha			750 Ha		750 Ha		750 Ha		750 Ha		750 Ha		750 Ha		
	3		Luas Penyediaan dan Pengembangan Lahan Ternak / Pengembalian Umum (Ha)	50 Ha	250 Ha			250 Ha		250 Ha		250 Ha		250 Ha		250 Ha		250 Ha		
3	2	7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian	5 BPP dan 50 WKPP	5 BPP dan 50 WKPP	2.780.991.200	5 BPP dan 50 WKPP	3.164.591.300	5 BPP dan 50 WKPP	2.130.170.200	5 BPP dan 50 WKPP	4.450.000.000	5 BPP dan 50 WKPP	4.500.000.000	5 BPP dan 50 WKPP	4.600.000.000	5 BPP dan 50 WKPP	21.625.752.700	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



Kode	Misi/Tujuan /Saranan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2021		2022		2023		2024		2025		2026							
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
			di BPP dan WKPP yang difasilitasi																		
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang difasilitasi	320 Lembaga	400 Lembaga	450 Lembaga		500 Lembaga		550 Lembaga		600 Lembaga		650 Lembaga		650 Lembaga					
Meningkatnya peran sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), ekonomi kreatif dan BUMKam			Kontribusi Lapangan Usaha Perdagangan dan Jasa (%)	17,53	18,66	3.872.780.400	19,18	1.950.546.400	19,22	16.536.969.300	19,26	19.730.013.950	19,31	21.342.016.043	20,31	21.643.318.449	20,31	85.075.644.541			
2	1	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN	Presentase Usaha Mikro yang diberdayakan	na	-			-		-		50%	250.000.000	75%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	750.000.000	Bagian Perekonomian dan SDA
2	1	0	PROGRAM PENGELOMPOKAN UMKM	Presentase Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	na	-		79.250.000		-		25%	250.000.000	50%	250.000.000	75%	250.000.000	75%	829.250.000	Bagian Perekonomian dan SDA	



Kode			Misi/Tujuan /Saranan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
Capaian	Rp	Capaian	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
3	2	0	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Destinasi/ Fasilitasi/ dokumen	4	6	2.150.000.000	16	434.366.700	29	13.050.000.000	29	14.150.000.000	29	15.100.000.000	29	14.650.000.000	29	59.534.366.700	Dinas Pariwisata , Pemuda dan Olahraga
3	2	3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah wisatawan Mancanegara	5	10	1.172.780.400	10	911.586.100	30	2.000.000.000	50	2.300.000.000	55	2.645.000.000	60	3.041.750.000	215	12.071.116.500	Dinas Pariwisata , Pemuda dan Olahraga
				Jumlah wisatawan Nusantara	2500	2700		3000		200		300		350		400		6950		
				Presentase PAD Sektor Pariwisata						2%			3%	3%	4%	12%				
3	2	0	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Pelaku Usaha Berbasis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kreatif Unggulan	20	25	500.000.000	60	435.443.600	70	808.696.300	85	2.000.000.000	105	2.200.000.000	130	2.420.000.000	130	8.364.139.900	Dinas Pariwisata , Pemuda dan Olahraga
3	2	0	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Sub Sektor Eksraf yang Dikembangkan	na	25%	50.000.000	35%	89.900.000	20%	678.273.000	20%	780.013.950	20%	897.016.043	20%	1.031.568.449	20%	3.526.771.441	Dinas Pariwisata , Pemuda dan Olahraga
Meningkatnya investasi daerah			Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMMA) (Dalam Miliar)*	2.815	*2.694.979.781.570	1.444.429.500	*351.334.825.000	1.047.764.226	350	4.190.692.200	360	5.387.070.400	365	5.925.777.440	370	6.518.355.184	1.100	24.514.088.950		



Kode			Misi/Tujuan /Saranan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
2	1	0	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Proyek Berskala Nasional (PMDN/PMA)	36 Proyek	17 Proyek	535.255.700	38 Proyek	463.748.680	55 Proyek	1.686.457.200	63 Proyek	2.290.105.400	73 Proyek	2.519.115.940	84 Proyek	2.771.027.534	84 Proyek	10.265.710.454	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	1	0	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor			-		-	55 investor	534.235.000	63 investor	929.965.000	73 investor	1.022.961.500	84 investor	1.125.257.650	84 investor	3.612.419.150	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	1	0	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Cakupan Pelayanan Penanaman Modal	100%	100%	909.173.800	100%	584.015.546	100%	1.970.000.000	100%	2.167.000.000	100%	2.383.700.000	100%	2.622.070.000	100%	10.635.959.346	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat				PDRB Per Kapita (Juta Rp) *Atas Harga Berlaku	85,38	90,17	8.618.976.500	94,51	8.928.857.400	100,42	12.555.741.100	106,71	12.604.664.000	113,39	13.139.030.000	120,48	13.501.833.300	120,48	71.421.686.300	
Berkurangnya angka kemiskinan				Angka Kemiskinan (%)	11,44	11,90	8.493.976.500	11,55	7.333.857.400	11,39	10.380.741.100	10,94	9.929.664.000	10,50	9.964.030.000	10,09	10.001.833.300	10,09	58.176.686.300	
1	0	0	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Penyandangan Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani	68,84%	68,84%	1.304.633.000	72%	363.416.000	72%	2.436.000.000	81%	2.436.000.000	91%	2.436.000.000	100%	2.436.000.000	100%	13.484.633.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	0	0	PROGRAM PERLINDUAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase masyarakat yang mendapat kaan perlindungan dan jaminan sosial	100%	33,33%	6.400.000.000	66,67	6.400.000.000	66,67	6.400.000.000	66,67	6.400.000.000	83,33	6.400.000.000	100%	6.400.000.000	100%	38.400.000.000	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Kode			Misi/Tujuan /Saranan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
3	3	4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang diselenggarakan	20%	20%	200.000.00	20%	200.000.00	40%	500.000.00	60%	750.000.00	100%	750.000.00	100%	750.000.00	100%	3.150.000.00	Bagian Perekonomian dan SDA
2	1	4	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	150 KK	600 KK	589.343.500	600 KK	370.441.400	350 KK	1.044.741.100	400 KK	343.664.000	450 KK	378.030.000	500 KK	415.833.300	500 KK	3.142.053.300	Dinas Kesehatan , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,49	3,14	125.000.000	2,44	1.595.000.000	2,42	2.175.000.000	2,40	2.675.000.000	2,36	3.175.000.000	2,38	3.500.000.000	2,32	13.245.000.000		
2	0	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	cakupan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	5 orang	0	-	10%	725.000.00	20%	750.000.00	30%	875.000.00	40%	1.000.000.00	50%	1.025.000.00	50%	4.375.000.00	Bagian Kesejahteraan Rakyat
2	0	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Presentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	0%	0%	125.000.00	65%	550.000.00	70%	700.000.00	75%	850.000.00	80%	1.000.000.00	85%	1.125.000.00	85%	4.350.000.00	Bagian Kesejahteraan Rakyat
2	0	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penyelesaian Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap	0%	0%	-	70%	320.000.00	75%	725.000.00	80%	950.000.00	85%	1.175.000.00	90%	1.350.000.00	90%	4.520.000.00	Bagian Kesejahteraan Rakyat



Kode	Misi/Tujuan /Saranan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026						
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
			kebijakan pemerintah daerah																	
			Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdayasaing tinggi	125.508.3 31.974		153.918.57 1.773		161.924.57 1.100		190.101.44 7.679		210.082.41 1.172		231.811.77 1.522		1.073.347.1 05.220				
	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indek Pembangunan Manusia	67,09	67,95	125.508.3 31.974	68,75	153.918.57 1.773	69,32	161.924.57 1.100	69,90	190.101.44 7.679	70,48	210.082.41 1.172	71,07	231.811.77 1.522	71,07	1.073.347.1 05.220			
	Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	Angka rata-rata lama sekolah	7,97	8,81		8,36		8,46		9,00		9,21		9,26		9,26				
		Harapan Lama Sekolah	12,51	12,61	93.087.82 7.874	12,62	98.784.789. 273	12,70	102.091.91 0.300	12,80	178.631.65 8.699	198.189.89 2.404	0,54	13,20	219.443.34 8.918	219.443.34 8.918	890.229.42 7.468			
1 0 1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	100,42	109,7		73,02		80,35		80,73		90,27		90,47		90,47		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			APM SD/MI	89,29	90,15		74,91		80,73		90,15		90,36		90,78		90,78			
			APK SD/MI	102,16	100,68		82,16		100,6 0		100,7 0		100,8 0		100,9 0		100,9 0			
			APM SMP/MTs	69,77	90,15		63,55		71,30		71,75		72,65		73,00		73,00			
			APK SMP/MTs	97,40	98,03		82,16		90,00		93,55		98,33		100,0 0		100,0 0			
			APS 5-6 Tahun Paud	80,75	80,75		80,74		80,50		80,60		80,80		90,00		90,00			
			APS 7-15 Tahun Pendidikan Dasar	98,03	98,03		99,35		99,40		90,45		90,57		90,67		90,67			



Kode		Misi/Tujuan /Saranan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026					
Capaian	Rp	Capaian	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
			APS 7-18 Tahun Pendidikan Kesetaraan	3,51	3,51		0,52		2,53		3,85		4,55		5,67		5,67			
1	0	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Muatan Kurikulum yang dikembangkan	na						100%	3.000.000.00	100%	3.600.000.00	100%	4.320.000.00	100%	10.920.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	0	4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidikan dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi S1/D-IV	68,00%	70,00%	397.276.00	80,00%	490.155.000	84,00 %	922.740.600	86,00 %	1.489.329.000	92,00 %	1.787.194.800	93,00 %	2.144.633.760	93,00 %	7.231.329.160	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Ketersediaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia	100,00%	100,00%	16.766.036.714	100,00%	28.431.831.049			100,00%	34.893.308.959	100,00%	38.382.639.855	100,00%	42.220.903.840	100,00%	160.694.720.417	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat				Umur Harapan Hidup (Tahun)	72,10	72,33	32.420.504.100	72,35	55.133.782.500	72,49	59.832.660.800	72,64	11.469.788.980	72,78	11.892.518.768	73,15	12.368.422.605	73,15	183.117.677.753	
1	0	2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase balita gizi buruk	0,30	0,27	31.203.951.200	0,27	54.158.475.300	0,15	58.421.613.000	0,10	2.840.556.800	0,5	3.032.130.800	0	3.248.676.400	0	152.905.403.500	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	19,12	9		17		7		6		5		4				
				Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	570	2		0		2		1		1		0				
				Rasio posyandu	1 : 50 balita	1 : 50 balita		1 : 50 balita		1 : 50 balita		1 : 50 balita		1 : 50 balita		1 : 50 balita				



Kode	Misi/Tujuan /Saranan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026						
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
per satuan balita	Rasio pustekmas , poliklinik, pustu per satuan penduduk	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Prevalensi stunting	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Angka kejadian Malaria	1,17	1,20	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23		



Kode		Misi/Tujuan /Saranan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
Capaian	Rp	Capaian	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	2	0.14	0.05	2	2	97,00	1	1	98,00	98,00	98,00	98,00	1	1		
			Percentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	97 persen	98			100%											
1	0		Rasio dokter per satuan penduduk	1 : 71	1 : 70	403.097.800	208.285.200	1 : 70	676.766.000	1 : 80	1 : 83	20.885.200	20.885.200	20.885.200	20.885.200	1 : 70	1 : 70	1.350.804.600	Dinas Kesehatan , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	3		Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1 : 59	1 : 90														
			Akkreditasi Rumah Sakit dan Puskesmas	90%	100%			16.66%											
		Program Sedian Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Cakupan Ketersediaan Obat sesuai Kebutuhan	100 persen	100 Persen	243.596.500	100 Persen	-	100 persen	100 persen	100 persen	6.752.576.600	6.752.576.600	6.752.576.600	6.752.576.600	100 persen	100 persen	20.501.326.300	Dinas Kesehatan , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	0		Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100 persen	100 Persen														
2	4		Cakupan Pengawasan Makanan dan Minuman	0 Persen	100 Persen			0											



Kode		Misi/Tujuan /Saranan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026					
Capaian	Rp	Capaian	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
1	0	2	5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	72 persen	100 Persen		100 Persen	75%		76 persen		77 persen		78 persen		78 persen	Dinas Kesehatan , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
					Cakupan rumah tangga sehat (PHBS Rumah Tangga)	3,2 persen (630 RT)	600 RT	569.858.600	767.022.000	800 RT	734.281.800	850	861.575.500	900	993.311.800	950	1.143.308.600	950	5.069.358.300	
					Cakupan Desa/Kelurahan mengalami	21 KLB	1573		260	23 KLB		24KL B		25KL B		26 KLB		26 KLB		
1	0	2	7	Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi Utama	na	-		-	-	-	20%	994.194.880	40%	1.093.614.368	60%	1.202.975.805	60%	3.290.785.053	Dinas Kesehatan , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel					636.724.083.530		709.064.228.897		871.355.067.645		968.421.828.156		1.046.003.658.498		1.125.137.484.839		5.348.608.163.352			
Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik			Indeks Reformasi Birokrasi	C	C	636.724.083.530	CC	709.064.228.897	CC	871.355.067.645	B	968.421.828.156	B	1.046.003.658.498	B	1.125.137.484.839	B	5.348.608.163.352		
Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas			Indeks Kepuasan Masyarakat	na	98,34	4.975.858.600	n.a	13.347.042.100	98,44	18.827.243.100	98,54	20.333.105.800	98,64	21.313.735.500	98,74	21.047.413.000	98,74	99.844.398.100		



Kode			Misi/Tujuan /Saranan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
5	0	2	Program Kepergawai an Daerah	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	70,00%	72,00%	3.965.858.600	75,00%	4.104.602.100	80,00 %	8.115.939.000	80,00 %	8.015.550.800	82,50 %	8.399.323.200	85,00 %	7.171.598.000	85,00 %	39.772.871.700	Badan Kepergawai an dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	0	2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (PNS)	75,00%	76,00%	10.000.000	78,00%	10.000.000	81,00 %	749.999.100	81,00 %	1.500.000.000	82,50 %	1.728.212.300	84,00 %	1.700.000.000	84,00 %	5.698.211.400	Badan Kepergawai an dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	1	2	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase perekama n KTP-el	99,00%	99,20%	5.400.515.000	99,35%	5.753.645.000	99,50 %	6.003.365.000	99,65 %	6.229.650.000	99,80 %	6.656.195.000	100,0 %	30.043.370.000	100,0 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
				Persentase cakupan Kartu Keluarga yang diterbitkan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
				Persentase penerbitan KIA dan pemanfaatan KIA dalam pelayanan Adminduk	62%	65%		70%		75%		80%		85%		90%				
2	1	3	Program Pencatatan Sipil	Persentase cakupan akta kelahiran umum (> 18 tahun) yang diterbitkan	100%	100%	2.731.925.000	100%	3.007.660.000	100%	3.343.550.000	100%	3.485.910.000	100%	3.948.980.000	100%	16.518.025.000	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
				Persentase anak (usia 0 s.d. 18 tahun) yang memiliki	94%	95%		97%		98%		99%		100%		100%				



Kode	Misi/Tujuan /Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026						
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
				akta kelahiran																
				Persentase cakupan kepemilikan buku nikah / akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya tercatat	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
				Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian dari semua individu yang perceraian nya tercatat	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
7 0 1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Masyarakat Penerima layanan di tingkat Kecamatan Long Bagun	100%	100%	-	100,00%	-	0,00 %	-	100,0 0	170.640.00	100,0 0%	170.640.0 0	100,0 0%	170.640.0 0	100,0 0%	511.920.0 0	Kecamatan Long Bagun	
7 0 1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Masyarakat Penerima layanan di tingkat Kecamatan Long Apari	100%	100%	250.000.0 00	100,00%	275.000.0 0	0,00 %	300.000.0 0	100,0 0	325.000.0 0	100,0 0%	325.000.0 0	100,0 0%	350.000.0 0	100,0 0%	1.825.000.0 00	Kecamatan Apari	
7 0 1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Masyarakat Penerima layanan di tingkat	100%	100%	250.000.0 00	100,00%	275.000.0 0	0,00 %	300.000.0 0	100,0 0	325.000.0 00	100,0 0%	325.000.0 0	100,0 0%	350.000.0 0	100,0 0%	1.825.000.0 00	Kecamatan Laham	



Kode		Misi/Tujuan /Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
		PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Laham																		
7	0	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Masyarakat Penerima layanan di tingkat Kecamatan Long Hubung	100%	100%	250.000.00	100,00%	275.000.00	0,00 %	300.000.00	100,00	325.000.00	100,00%	325.000.00	100,00%	350.000.00	100,00%	1.825.000.00	Kecamatan Long hubung
7	0	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Masyarakat Penerima layanan di tingkat Kecamatan Long Pahangai	100%	100%	250.000.00	100,00%	275.000.00	0,00 %	300.000.00	100,00	325.000.00	100,00%	325.000.00	100,00%	350.000.00	100,00%	1.825.000.00	Kecamatan Long Pahangai
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah				Predikat SAKIP	CC (50,09)	CC (50,57)	340.399.782.705	CC (50,98)	397.386.334.421	CC (51,87)	508.614.958.495	CC (52,78)	584.803.600.856	CC (53,70)	646.572.333.498	CC (54,63)	709.709.403.579	CC (54,63)	3.187.486.413.554		
		0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	B	BB	17.324.569.300	BB	17.359.336.100	BB	18.967.670.700	BB	16.962.451.000	BB	17.967.670.700	A	15.967.670.700	A	104.549.368.500	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	B	BB	2.627.961.699	BB	6.143.600.893	BB	10.981.707.000	BB	4.940.235.300	BB	11.241.864.400	A	11.473.725.900	A	47.409.095.192	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Kode	Misi/Tujuan /Saranan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026						
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	B	BB	13.841.29 6.732	BB	15.526.881. 827	BB	20.720.358. 900	BB	23.680.554. 500	BB	23.834.554. 500	A	23.834.554. 500	A	121.438.20 0.959	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Inspektora t	B	BB	5.744.578. 550	BB	6.837.171.9 81	BB	7.399.846.6 60	BB	10.211.253. 361	BB	12.140.128. 273	A	13.273.916. 926	A	55.606.895. 751	Inspektora t	
	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja	B	BB	7.043.932. 700	BB	8.951.013.2 00	BB	8.651.119.5 00	BB	8.865.471.0 00	BB	9.000.000.0 00	A	9.500.000.0 00	A	52.011.536. 400	Satuan Polisi Pamong Praja	
	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Badan Pendapatan Daerah	B	BB	4.984.938. 576	BB	5.229.060.0 99	BB	7.519.712.8 00	BB	8.494.428.5 00	BB	10.329.099. 200	A	8.472.120.0 00	A	45.029.359. 175	Badan Pendapatan Daerah	
	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	na		-	C	3.310.992.6 00	CC	7.392.432.6 00	CC	17.934.838. 800	CC	16.685.795. 100	B	17.245.795. 100	B	62.569.854. 200	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat SAKIP Sekretariat DPRD	B	BB	28.907.56 1.050	BB	27.893.778. 658	BB	29.340.876. 024	BB	46.590.558. 372	BB	36.959.045. 972	A	40.220.000. 000	A	209.911.82 0.076	Sekretaria t DPRD	



Kode		Misi/Tujuan /Saranan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Predikat SAKIP Badan Kepegawai an dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	B	BB	9.031.273.000	BB	15.764.625.600	BB	9.016.434.200	BB	9.894.391.100	BB	9.134.070.100	A	9.820.682.600	A	62.661.476.600	Badan Kepegawa ian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Dinas Perhubungan	B	BB	8.340.246.500	BB	10.175.713.400	BB	61.514.606.000	BB	69.912.660.900	BB	70.611.932.200	A	72.188.932.200	A	292.744.091.200	Dinas Perhubungan
	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	B	BB	5.791.600.000	BB	6.435.111.100	BB	7.150.123.500	BB	7.865.135.800	BB	8.651.649.400	A	9.516.814.400	A	45.410.434.200	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Sekretariat Daerah	B	BB	43.792.405.500	BB	48.658.228.400	BB	54.064.698.200	BB	59.471.168.000	BB	65.418.284.800	A	71.960.113.300	A	343.364.898.200	Sekretaria t Daerah
	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	B	BB	9.642.161.200	BB	12.395.941.077	BB	11.914.741.100	BB	12.665.827.600	BB	13.932.410.400	A	15.325.651.400	A	75.876.732.777	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Badan Pengelola Perbatasan Negara	na	-	C	4.405.408.041	CC	5.170.860.961	CC	5.579.969.548	CC	6.430.000.000	B	6.692.500.001	B	28.278.738.551	Badan Pengelola Perbatasan Negara	



Kode		Misi/Tujuan /Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
Capaian	Rp	Capaian	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Badan Kesbangpol	na	CC	7.007.336.300	CC	7.785.929.200	CC	8.651.032.500	CC	9.516.135.700	C	10.467.749.300	C	11.514.524.300	C	54.942.707.300	Badan Kesbangpol
	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	B	BB	5.915.819.200	BB	6.573.132.400	BB	7.303.480.500	BB	8.033.828.500	BB	8.837.211.400	A	9.720.932.500	A	46.384.404.500	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	B	BB	19.328.909.368	BB	20.197.223.660	BB	32.948.964.600	BB	40.492.599.900	BB	69.409.706.500	A	93.292.491.100	A	275.669.895.128	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	B	BB	6.304.472.600	BB	7.004.969.500	BB	7.783.299.500	BB	8.561.629.400	BB	9.417.792.400	A	10.359.571.600	A	49.431.735.000	Dinas Lingkungan Hidup
	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	B	BB	4.682.830.705	BB	7.274.903.977	BB	8.002.394.400	BB	8.802.633.800	BB	9.682.897.200	A	10.651.186.900	A	49.096.846.982	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	B	BB	52.599.131.625	BB	62.806.710.508	BB	85.164.060.450	BB	97.973.452.475	BB	107.728.471.653	A	118.614.835.252	A	524.886.661.962	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Kode		Misi/Tujuan /Saranan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
Capaian	Rp	Capaian	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	B	BB	4.978.150.000	BB	4.978.150.000	BB	4.978.150.000	BB	4.978.150.000	BB	4.978.150.000	A	4.978.150.000	A	29.868.900.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	B	BB	62.153.059.400	BB	69.058.954.900	BB	68.845.613.600	BB	75.730.175.000	BB	83.303.192.500	A	91.633.511.700	A	450.724.507.100	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	B	BB	685.269.900	BB	761.411.000	BB	846.012.200	BB	930.613.400	BB	1.023.674.800	A	1.126.042.200	A	5.373.023.500	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Kecamatan Long Bagun	na	CC	3.278.787.600	CC	3.643.097.300	CC	4.047.885.900	CC	4.452.674.500	C	4.897.941.900	C	5.387.736.100	C	25.708.123.300	Kecamatan Long Bagun
	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Kecamatan Long Hubung	na	CC	3.947.299.500	CC	4.385.888.300	CC	4.873.209.200	CC	5.360.530.100	C	5.896.583.100	C	6.486.241.400	C	30.949.751.600	Kecamatan Long Hubung
	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kecamatan Laham	na	CC	4.128.710.900	CC	4.587.456.500	CC	5.097.173.900	CC	5.606.891.300	C	6.167.580.400	C	6.784.338.500	C	32.372.151.500	Kecamatan Laham
	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Kecamatan Long Pahangai	na	CC	4.535.760.800	CC	5.039.734.200	CC	5.599.704.700	CC	6.159.675.200	C	6.775.642.700	C	7.453.207.000	C	35.563.724.600	Kecamatan Long Pahangai



Kode		Misi/Tujuan /asaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026						
Capaian	Rp	Capaian	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat SAKIP Kecamatan Long Apari	na	CC	3.781.720.000	CC	4.201.910.00	CC	4.668.788.900	CC	5.135.667.800	C	5.649.234.600	C	6.214.158.00	C	29.651.479.300	Kecamatan Long Apari	
Meningkatnya kinerja tata kelola keuangan dan aset daerah			Opini BPK (WTP)	WTP	WTP	41.763.442.225	WTP	41.070.852.376	WTP	78.175.566.050	WTP	88.210.384.500	WTP	93.497.261.500	WTP	100.111.998.660	WTP	434.731.317.099			
5	0	1	2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase sasaran dan program RKPD yang konsisten dengan RPJMD	100%	100%	11.325.000.000	95%	4.917.479.400	96%	5.816.293.800	96%	7.221.438.00	96%	7.943.581.800	97%	8.737.939.900	97%	45.961.732.900	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
					persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	100%	100%		95%	96%	96%	96%	96%	96%	97%	97%	97%				
5	0	1	3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	100%	100%		95%	96%	96%	96%	96%	96%	97%	97%	97%			Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
					Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100%	100%	7.200.000.000	95%	6.652.318.00	96%	7.071.867.500	96%	8.642.741.500	96%	8.257.259.400	97%	8.200.000.100	97%	37.766.927.100	



Kode		Misi/Tujuan /asaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam)	100%	100%		95%		96% %		96% %		96% %		97%		97%			
5	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase program/ kegiatan yang diikuti / dilaksanakan	0%	0%		100%	265.585.312	100%	100.000.000	100%	296.208.000	100%	260.000.000	100%	270.000.000	100%	1.350.864.500	Badan Pendapatan Daerah
5	0	0	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Target Penerimaan Pajak Daerah yg Terealisasi	181%	379%	3.860.554.170	64%	3.599.293.064	100%	2.182.992.250	100%	4.315.060.400	100%	3.895.875.000	100%	4.295.875.000	100%	22.149.649.884	Badan Pendapatan Daerah
5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD ##### #####	100%			100%		100%		100%		100%		100%		100%	182.267.526.300	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Aset Daerah yang ditata dengan baik	60%	62%	3.832.087.400	64%	8.862.629.000	66%	26.496.956.000	68%	26.996.956.000	69%	27.996.956.000	70%	28.996.956.000	70%	123.182.540.400	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
6	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase OPD yang memperoleh nilai SAKIP dengan predikat minimal CC	61%	71%		75%		79%		82%		86%		89%		89%	15.279.827.743	Inspektora
				Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil	42%	54%		58%		59%		59%		59%		60%		60%		



Kode		Misi/Tujuan /Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
Capaian	Rp	Capaian	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
6 0 1 0 3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pemeriksaan Inspektorat			617.779,200	Level 2	83%	84%	84%	84%	84%	85%	85%	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Inspektorat
		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI	80%	82%															
		Level Kapabilitas APIP Kabupaten Mahakam Ulu	Level 2 Plus	Level 2															
Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik			Jumlah Desa Maju	6	7	249.585,00.000	8	257.260,00.000	10	265.737,30.000	12	275.074,73.7.000	15	284.620,32.8.000	20	294.268,66.9.600	20	1.626.546,034.600	
2 1 3	2	PROGRAM PENATAAN DESA	Jumlah Desa Tertinggal	15	14				7		6		4		2		2		
		Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	60%	76%	237.000,00.000	78%	244.110,00.000	80%	251.433,30.000	82%	258.976,29.9.000	84%	266.745,58.8.000	86%	274.747,95.5.600	86%	1.533.013,142.600	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	



Kode			Misi/Tujuan /asaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						2021		2022		2023		2024		2025		2026							
Capaian	Rp	Capaian	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)					
2	1	3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah kerjasama antar desa	9	5	650.000.00	5	715.000.00	5	786.500.00	5	865.150.00	5	951.665.00	5	1.046.831.500	5	5.015.146.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung			
2	1	3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan desa yang berjalan dengan baik	100%	100%	2.750.000.000	100%	2.495.000.000	100%	2.709.500.000	100%	2.945.450.000	100%	3.204.995.000	100%	3.490.494.500	100%	17.595.439.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung			
2	1	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	15,6	21,6	7.925.000.000	8.680.000.000	9.548.000.000	10.502.800.000	11.553.080.000	12.708.388.000	16.917.268.000	16.917.268.000	16.917.268.000	16.917.268.000	16.917.268.000	16.917.268.000	16.917.268.000	16.917.268.000	16.917.268.000	16.917.268.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
				Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	25,6	33,6																	
				Persentase LSM aktif	15,6%	18,6%																	
				Persentase LPM Berprestasi	0,0%	4,0%																	
				Persentase PK aktif	51,2%	60,0%																	
				Persentase Posyandu aktif	48,3%	50,0%																	
				Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	24,0%	26,0%																	



Kode		Misi/Tujuan /Saranan/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					2021		2022		2023		2024		2025		2026							
					Capaian	Rp	Capaian	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)				
7	0	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	0%	20%	-	40,00%	-	0,00 %	-	80%	145.310.000	100,0 0%	200.000.00	100,0 0%	200.000.00	100,0 0%	545.310.000	Kecamatan Long Bagun		
7	0	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	390.000.000	Kecamatan Apari				
7	0	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	390.000.000	Kecamatan Laham				
7	0	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	390.000.000	Kecamatan Long hubung				



Kode	Misi/Tujuan /Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026						
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
			t di wilayah kecamatan																	
7	013	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	390.000.000	Kecamatan Long Pahangai			
7	016	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1	3	-	3	-	4	-	5	379.728.000	10	705.000.000	11	815.000.000	11	1.899.728.000	Kecamatan Long Bagun	
7	016	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	na	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	1.500.000.000	Kecamatan Apari			
7	016	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	na	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	1.500.000.000	Kecamatan Laham			
7	016	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan	na	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	1.500.000.000	Kecamatan Long hubung			



Kode	Misi/Tujuan /S asaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Realisasi				RKPD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Akhir Kinerja		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026						
				Capaian	Rp	Capaian	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
			pemerintahan desa																	
7	0	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	na	100	250.000.00	100	250.000.00	100	250.000.00	100	250.000.00	100	250.000.00	100	1.500.000.00	Kecamatan Long Pahangai		
TOTAL ANGGARAN				961.992.557.024		1.099.776.528.357		1.456.077.439.003		1.549.876.007.611		1.687.834.051.282		1.820.200.044.528		8.575.756.627.805				